

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERANAN  
PENGURUS BADAN USAHA MILIK PEKON PEKON GISTING BAWAH  
KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

Oleh

**Bella Aldila**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **Factors that Related to The Role of Village Owned Enterprise Manager in Gisting Bawah Village Gisting Sub District Tanggamus District**

**By**

**Bella Aldila**

This research aimed to determine: (1) factors that related to the role of BUM Pekon Mandiri Bersatu manager, (2) the changes of customer's income before and after being a member of BUM Pekon Mandiri Bersatu, and (3) obstacles were impression by BUM Pekon Mandiri Bersatu manager to carry out their duties. The research was conducted on Gisting Bawah Village of Gisting Subdistrict, Tanggamus Regency purposively. The samples of this research were 10 persons of BUM Pekon Mandiri Bersatu manager and 46 customers who is the members of BUM Pekon Mandiri Bersatu. The research data collection was conducted from March 2017 until April 2017. The research data was analyzed descriptively, with Rank Spearman. The results showed that: (1) there is definite relationship between human resource quality variable and work environment with the role of manager of BUM Pekon Mandiri Bersatu and there is no definite relationship between customers' support and wage or salary with the role of manager of BUM Pekon Mandiri Bersatu; (2) there is a change in the customers income level who are members' of BUM Pekon Mandiri Bersatu between before and after being a members of BUM Pekon Mandiri Bersatu, and (3) obstacles were impression by BUM Pekon Mandiri Bersatu manager were capital and customer complaint problem.

**Keywords:** BUM Pekon Mandiri Bersatu, customer, income, manager, role

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERANAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK PEKON PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**

**Oleh**

**Bella Aldila**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu, (2) perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan sebelum bergabung dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu, (3) kendala-kendala yang dialami pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu. Penelitian dilakukan di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja. Sampel penelitian ini adalah 10 orang pengurus dan 46 orang nasabah/pelanggan. Pengambilan data penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan uji rank spearman. Hasil penelitian adalah: (1) terdapat hubungan yang nyata antara variabel kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan kerja dengan peranan pengurus dan tidak terdapat hubungan yang nyata antara variabel upah/gaji dan dukungan nasabah/pelanggan dengan peranan pengurus; (2) terdapat perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan antara sebelum dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu; (3) kendala yang dialami pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu yaitu permodalan dan masalah komplain pelanggan bank sampah.

Kata kunci: BUM Pekon Mandiri Bersatu, nasabah/pelanggan, pendapatan, pengurus, peranan

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERANAN  
PENGURUS BADAN USAHA MILIK PEKON PEKON GISTING BAWAH  
KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**

**Oleh**

**Bella Aldila**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PERTANIAN**

Pada

Jurusan Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi

**: FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN PERANAN PENGURUS BADAN  
USAHA MILIK PEKON PEKON GISTING  
BAWAH KECAMATAN GISTING  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa

**: Bella Aldila**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1314131019**

Jurusan

**: Agribisnis**


Fakultas

**: Pertanian**

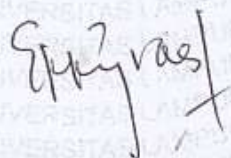
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.Si**  
NIP 19581111 198603 1 004

  
**Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.**  
NIP 19590321 198506 1 001

**2. Ketua Jurusan / Program Studi**

  
**Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P.**  
NIP 19630203 198902 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua

**: Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.Si**



Sekretaris

**: Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.**



Penguji

Bukan Pembimbing

**: Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M.Si.**



Dekan Fakultas Pertanian

**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**

NIP 19611020 198603 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 November 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 19 Juni 1995, dari pasangan Bapak Kusnin dan Ibu Rafika Duri. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menyelesaikan studi tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyah Bustanul Athfal pada tahun 2001, tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Pajar Mataram pada tahun 2007, tingkat pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Seputih Mataram pada tahun 2010, dan tingkat atas (SMA) di SMA Negeri 1 Seputih Mataram pada tahun 2013. Penulis diterima di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa penyandang Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah menjadi anggota bidang pengkaderan dan pengabdian masyarakat Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEPERTA) tahun 2013-2017, kepala bidang komunikasi dan informasi Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung tahun 2015-2016.

Penulis pernah mendapatkan juara 2 pada perlombaan panggung kreatifitas Unila Career dan Entrepreneurship Day 2014, mendapatkan juara 3 Story Telling Social Economy English Club English Competition pada tahun 2014, mendapatkan juara 2 Story Telling Social Economy English Club English Competition pada tahun 2015.

Pada April 2015, penulis mengikuti Silaturahmi dan Musyawarah Nasional Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan selama 5 hari. Pada Januari 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kelurahan Batanghari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari. Selanjutnya, pada Juli 2016 penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah selama 30 hari kerja efektif.



## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahilalhirobbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya Rabbalalaamiin.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus**, banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M. S. sebagai dosen Pembimbing Pertama, atas ketulusan hati dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyusunan skripsi.

2. Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M. S. selaku dosen Pembimbing Kedua, atas ketulusan hati dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
3. Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M. Si. sebagai Dosen Penguji, atas nasihat, saran dan arahan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Ir. Eka Kasymir, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas arahan, bimbingan dan nasihat yang diberikan.
5. Teristimewa keluargaku, Ayahanda tercinta Alm. Hudi Subroto dan Ayah Kusnin, Ibunda tersayang Rafika Duri, kedua adikku Akbar Prasetyo dan Putri Kusfika Salsabila, Kakungku tersayang Eko Suprpto serta seluruh keluarga besarku, atas semua limpahan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat, semangat, motivasi, saran, dan perhatian yang tulus kepada penulis selama ini.
6. Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S. selaku Ketua Jurusan Agribisnis, yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat.
7. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Jurusan Agribisnis, atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
9. Karyawan-karyawan di Jurusan Agribisnis, Mba Ayi, Mba Fitri, Mba Iin, Mas Boim, Mas Kardi, dan Mas Bukhari, atas semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
10. Ibu Lilis dan Pak Agung, terima kasih atas semua arahan, bantuan, dan izin yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat seperjuangan Bidikmisi Universitas Lampung, Andi Kurniawan, S.E., M. Agung Hardiyanto, Erika Widiastuti atas doa, dukungan, semangat, dan telah menjadi sahabat terbaik dalam mengabdikan untuk bidikmisi selama ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik, Eka Setiososari, Rahmi Eka Putri, S.P., Fitri Rofiqoh, Mba Yohilda, Aisyah Nur Citra Dewi, Ade Novia Rahmawati, S.P., Destika Maulidiawati, S.P., Agil Ikhsandi, David Irvanto, S.P., Warisman, Ni Komang Dyah T.A.N, Dona Meilani P., S.Si. atas bantuan, saran, dukungan, dan semangat yang telah diberikan.
13. Keluarga Aselole Jos, Ayu Novita Sari, S.P., Dwi Suryaningsih, S.P., Shima Uturza Basiroh, S.P., Ahmad Rohim, Mahmud Rifa'i, S.P., Putri Lepia Canita, S.P., Rani Satiti, S.P., Suf Ajizah, S.P., Brilian Patar terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
14. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 2013, Ibrohim, Kuantan, Silva, Stella, Nila, Irsa, Hesti, Jenissa, Erika, Doni, Fitri Yuni, Putri Mutia, Ahmad Mifta, Rika, Anissa Safira, Hafiza, Tiara, Selvy, Rayssa, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama ini.
15. Keluarga Wisma Cendrawasih, Dina Purwitasari, Landoria, Hanifa Numira Tama, Diah Resti, Qibtiyah, Kiky, Desti atas kebaikan, saran, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan di setiap hari.
16. Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung tempat menempa potensi diri.
17. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalaamiin. Akhirnya, penulis meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis,

*Bella Aldila*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b> .....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Peranan dan Peranan Pengurus .....	10
2. Pengertian BUMDes .....	16
3. Tujuan Pendirian BUMDes.....	18
4. Landasan Hukum BUMDes .....	20
5. Prinsip Pengelolaan BUMDes .....	22
6. Teori Pendapatan Rumah Tangga.....	24
7. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Pemikiran .....	30
D. Hipotesis .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional .....	35
1. Variabel Bebas (X) .....	35
2. Variabel Terikat (Y).....	39
3. Variabel (Z).....	43
B. Lokasi, Waktu, dan Responden .....	43
C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data .....	45
D. Metode Analisis dan Pengujian Data .....	46

<b>IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus.....	49
1. Keadaan Geografi .....	49
2. Keadaan Iklim.....	50
3. Keadaan Demografi .....	50
B. Kecamatan Gisting .....	51
1. Keadaan Geografis.....	51
2. Keadaan Iklim.....	52
3. Keadaan Demografi .....	52
C. Pekon Gisting Bawah .....	53
D. BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	54
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Keadaan Umum Responden.....	62
1. Umur Responden.....	62
2. Pendidikan .....	64
B. Deskripsi Faktor-faktor yang Diduga Berhubungan dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga .....	65
1. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pengurus) .....	66
2. Dukungan Nasabah/Pelanggan.....	68
3. Lingkungan Kerja.....	70
4. Upah/gaji .....	71
C. Deskripsi Variabel Y (Peranan Pengurus).....	73
1. Peranan Pengurus dalam Melakukan Pelayanan Kebutuhan Ekonomi Warga Masyarakat .....	74
2. Peranan Pengurus dalam Memupuk Usaha Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Perekonomian dan Instansi Lain.....	76
3. Peranan Pengurus dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Pekon Gisting Bawah .....	79
4. Peranan Pengurus dalam Memberi Laporan Perkembangan Usaha Kepada Masyarakat Pekon Gisting Bawah .....	81
D. Pengujian Hipotesis.....	83
1. Hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Peranan Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah .....	84
2. Hubungan antara Dukungan Nasabah/Pelanggan dengan Peranan Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah .....	87
3. Hubungan antara Lingkungan Kerja dengan Peranan Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah .....	88
4. Hubungan antara Upah/Gaji dengan Peranan Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah .....	90
5. Perubahan Tingkat Pendapatan Nasabah/Pelanggan BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah .....	92
E. Kendala-kendala di BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	95

<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
<b>LAMPIRAN</b> .....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah BUMDes Provinsi Lampung .....	4
2. Kajian Penelitian Terdahulu.....	27
3. Sebaran sampel penelitian di unit usaha air bersih, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pengelolaan sampah BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	45
4. Sebaran responden pengurus berdasarkan umur .....	62
5. Sebaran responden nasabah/pelanggan berdasarkan umur .....	63
6. Tingkat pendidikan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	64
7. Tingkat pendidikan nasabah/pelanggan BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	65
8. Pertanyaan dan nilai modus variabel kualitas sumberdaya manusia .....	66
9. Sebaran kualitas sumber daya manusia.....	67
10. Pertanyaan dan nilai modus dukungan nasabah/pelanggan .....	68
11. Sebaran dukungan nasabah/pelanggan di BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	69
12. Pertanyaan dan nilai modus lingkungan kerja .....	70
13. Sebaran lingkungan kerja di BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	71
14. Pertanyaan dan nilai modus upah/gaji.....	72
15. Upah/gaji pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	72
16. Sebaran peranan pengurus Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu .....	74
17. Melakukan pelayanan kebutuhan ekonomi warga masyarakat	
18. Sebaran responden berdasarkan pelayanan kebutuhan ekonomi warga masyarakat.....	75
19. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian dan instansi lain .....	77



20. Sebaran peranan pengurus dalam memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian dan instansi lain .....	78
21. Menggali dan memanfaatkan potensi Pekon Gisting Bawah.....	80
22. Sebaran peranan pengurus dalam menggali dan memanfaatkan potensi Pekon Gisting Bawah.....	80
23. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Pekon Gisting Bawah .....	82
24. Sebaran peranan pengurus dalam memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Pekon Gisting Bawah .....	82
25. Hasil pengujian statistik faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	84
26. Perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan antara sebelum dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	92
27. Identitas responden pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	101
28. Identitas responden nasabah/pelanggan BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	102
29. Variabel yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	104
30. Peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	105
31. Hasil MSI faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu (X).....	106
32. Hasil MSI peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu (Y) .....	108
33. Hasil analisis hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	110
34. Hasil analisis hubungan antara dukungan nasabah/pelanggan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	110
35. Hasil analisis hubungan antara lingkungan kerja dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	111
36. Hasil analisis hubungan antara kualitas sumber daya upah/gaji dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu .....	111
37. Pendapatan pelanggan unit usaha penyedia air bersih BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	112

38. Pendapatan pelanggan unit usaha bank sampah BUM Pekon	
Mandiri Bersatu.....	113
39. Pendapatan nasabah unit usaha simpan pinjam BUM Pekon	
Mandiri Bersatu.....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma hubungan peranan pengurus terhadap peningkatan rumah tangga masyarakat Pekon Gisting Bawah .....	34
2. Struktur organisasi BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Periode 2015-2020.....	61

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Upaya peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat dikemas rapi dalam sebuah pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan cara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut.

Pada umumnya pembangunan desa bersifat komprehensif dan dijadikan bagian integral pembangunan nasional. Pada hubungan ini, pembangunan desa dipandang sebagai metode dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Menurut Ndraha (1982), pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola ditingkat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Era otonomi yang terjadi telah banyak mendorong daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik sesuai dengan pembangunan desa. Otonomi yang sesungguhnya adalah otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri serta kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Pada Undang-Undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk mengakomodir perekonomian, kebutuhan serta potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal ke pasar.

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa wilayah pedesaan. Pada Tabel 1 dapat dilihat data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung Tahun 2014.

Tabel 1. Jumlah BUMDes Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Jumlah Desa/Pekon	Jumlah Bumdes
1	Lampung Selatan	256	20
2	Lampung Tengah	294	41
3	Lampung Utara	232	4
4	Lampung Barat	131	-
5	Tulang Bawang	147	3
<b>6</b>	<b>Tanggamus</b>	<b>299</b>	<b>2</b>
7	Lampung Timur	264	3
8	Way Kanan	216	1
9	Pesawaran	144	8
10	Pringsewu	126	25
11	Mesuji	105	-
12	Tulang Bawang Barat	93	4
13	Pesisir Barat	116	1
14	Kota Bandar Lampung	0	-
15	Kota Metro	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>2423</b>	<b>112</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1 Kabupaten Tanggamus memiliki jumlah desa/pekon terbanyak pertama di Provinsi Lampung, namun jumlah BUMDes yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus adalah terendah ketiga setelah Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat. BUMDes yang berada di Kabupaten Tanggamus yaitu berada di Pekon Gisting Bawah dan Pekon Wonoharjo.

Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Tanggamus adalah BUM Pekon Mandiri Bersatu yang terletak di Pekon Gisting Bawah yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat pada tanggal 05 Februari 2015. Peraturan desa Pekon Gisting Bawah yang mengatur tentang BUMDes Pasal 5 tentang tujuan pembentukan BUM Pekon salah satunya yaitu mengembangkan usaha

masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pekon Gisting Bawah dengan mendirikan dan mengembangkan BUM Pekon Mandiri Bersatu. Keberadaan BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah sangat dibutuhkan mengingat potensi yang dimiliki oleh Pekon Gisting Bawah sangat besar, antara lain sebagai sentra produksi sayur mayur dan palawija, juga memiliki potensi alam yang sangat besar, terutama sumber mata air yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Pemenuhan kebutuhan sayur mayur dan palawija di wilayah Bandar Lampung dipasok dari wilayah Gisting khususnya dan wilayah Tanggamus pada umumnya, disamping pasokan dari daerah-daerah lain.

BUM Pekon Mandiri Bersatu bergerak di bidang unit usaha penyedia air bersih, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pariwisata air, unit usaha bank sampah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pra *survey* yang telah dilakukan, BUM Pekon Mandiri Bersatu selain sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan dan sosial (*Profit and Social Oriented*), juga berfungsi sebagai :

1. Fasilitator

Kendala yang umum dihadapi bagi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya, adalah terbentur pada segi permodalan, sehingga hasil usahanya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup saja dan tidak bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka BUM Pekon Mandiri Bersatu menyediakan fasilitas bantuan modal usaha berupa pinjaman uang yang harus dikembalikan pada periode tertentu, sehingga dapat disalurkan kembali



pada pelaku usaha yang lain, dengan adanya fasilitas ini, diharapkan akan lebih menggairahkan para pelaku usaha untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

## 2. Stabilisator

Untuk menjaga harga jual produksi pertanian dan perkebunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan berimbang, maka BUM Pekon Mandiri Bersatu akan berfungsi sebagai stabilisator harga dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menampung kelebihan hasil produksi pertanian dan perkebunan yang tidak tersalurkan di pasar dan akan menjual kembali hasil produksi tersebut bila terjadi kelangkaan hasil produksi pertanian dan perkebunan dengan harga yang wajar. Demikian pula dalam proses pengelolaan sumberdaya alam terutama sumber mata air, yang sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan mandi, cuci dan minum, tanpa ada pengaturan pemakaian dan pemeliharaan yang baik, maka BUM Pekon Mandiri Bersatu melakukan pengaturan pemakaian, dengan melakukan desain pemanfaatan dan pemeliharaan sumber air bersih yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sampai ke rumah masing-masing dan pengelolaan objek wisata air.

Pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pembentukan BUM Pekon Mandiri Bersatu dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Pekon Gisting Bawah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. BUM Pekon Mandiri Bersatu telah memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks.

Pembagian kerja bagi pengurus juga sudah jelas tertuang dalam AD-ART BUM Pekon Mandiri Bersatu. Menurut AD-ART BUM Pekon Mandiri Bersatu Bab VII Pasal 9 Ayat (5) Direksi dan Kepala Unit Usaha ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

Adanya BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah, diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian Pekon Gisting Bawah sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang akhirnya bermuara pada taraf hidup masyarakat desa yang sejahtera. Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu harus mampu berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya yaitu melakukan pelayanan kebutuhan ekonomi warga masyarakat, memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Pekon Gisting Bawah, menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Pekon Gisting Bawah. Peranan pengurus berhubungan dengan beberapa faktor yang menunjang tugas yang diberikan. Peranan pengurus di BUM Pekon Mandiri Bersatu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini akan menimbulkan meningkatnya pendapatan rumah tangga masyarakat Pekon Gisting Bawah yang tergabung dalam BUM Pekon Mandiri Bersatu sehingga terjadi perubahan pendapatan antara sebelum bergabung dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka diteliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus Badan Usaha Milik Pekon di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu?
2. Apakah ada perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan antara sebelum dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.
2. Mengetahui perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan sebelum bergabung dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dialami pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. BUM Pekon Mandiri Bersatu sebagai masukan dan informasi dalam pengembangan dan implementasi program BUM Pekon di masa yang akan datang.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian lainnya yang sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Peranan dan Peranan Pengurus**

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1998).

Menurut Soekanto (2002) peranan memiliki keterkaitan dengan status seseorang, peranan dapat dilihat apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai status yang dimiliki.

Kedudukan (status) dan peranan yang tidak dapat dipisahkan, karena saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Peranan menentukan apa yang dibuat terhadap masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang.

Selain itu Soekanto (2002), mengemukakan bahwa peranan merupakan salah satu aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan menjalankan suatu peranan. Konsep peranan merupakan salah satu dari seperangkat istilah yang digunakan untuk mempelajari perilaku individu maupun kelompok, membatasi data yang dikumpulkan, dan mengarah analisis yang harus dilakukan.

Lebih jauh Soekanto (2002), menyatakan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu *social position* merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih merujuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Sajogyo (1985) peranan adalah pola kebudayaan yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan tertentu yang mencakup nilai

dan perilaku seseorang yang diharapkan oleh masyarakat pada kedudukan tertentu. Menurut Sayogyo (1985) terdapat beberapa konsep peranan yaitu:

a. *Role Prescription*

Rumusan tertulis harus dilakukan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem sosialnya.

b. *Role Perception*

Peranan seseorang terhadap peranan yang harus dilakukannya berdasarkan peranan yang telah dirumuskan.

c. *Role Performance*

Peranan yang dapat diperagakan oleh seseorang sehubungan dengan kedudukannya yang berdasarkan atas persepsinya terhadap peranannya yang telah dirumuskan dan kemampuan melaksanakan peranannya.

d. *Role Expection*

Peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya yang diharapkan oleh pihak lain, dapat dilakukan untuk kepentingan pihak lain.

Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2009).

Dari penjelasan yang telah diungkapkan tersebut maka indikator peranan adalah:

- a. Peraturan, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalihan tingkah laku yang sesuai dan diterima, setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.
- b. Konsep, konsep sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau bendabenda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.
- c. Hak dan kewajiban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu



atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan .

Masing-masing individu memiliki peranan yang bervariasi berdasarkan lingkungan hidupnya. Maka hal ini mengartikan bahwa peranan dapat menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat. Setiap lembaga selalu dijalankan oleh pengurus. Pengertian pengurus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Pengurus adalah penyelaras dan pengaruh dalam lembaga. Pengurus bertugas mengawasi aliran kerja di dalam lembaga dan menyatupadukan semua unsur lembaga. Pengurus bertanggung jawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengurus juga memiliki tugas untuk merancang dan mengimplementasikan strategi untuk berjalannya suatu kegiatan lembaga yang baik.

Peran pengurus BUMDes diorientasikan sebagai *volunteer* (relawan).

Relawan (bidang sosial) adalah mereka yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan berasal dari (lulusan) atau tidak mendapat pendidikan khusus dari sekolah pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial. Adapun peran relawan atau pekerja sosial menurut Adi (2008) adalah :

a. Pemercepat perubahan (*enabler*)

Peran sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah

mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

b. Perantara (*broker*)

Peran sebagai *broker* yaitu menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat, tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat.

c. Pendidik (*educator*)

Peran sebagai *educator* yaitu memprasyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga Ahli (*expert*)

Peran sebagai *expert* yaitu memprasyaratkan adanya kemampuan untuk dapat member masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area.

e. Perencanaan Sosial (*social planner*)

Peran sebagai *social planner* yaitu membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan rasional untuk menangani masalah tersebut.

f. Advokat (*advocate*)

Peran sebagai *advocate* yaitu mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memberikan bantuan layanan tersebut tidak memedulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga).

g. Aktivis (*activist*)

Peran sebagai *activist* yaitu menuntun pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan yang dianggap sebagai korban.

## 2. Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Desa (PAD). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan

pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Perda maupun Perdes.

### **3. Tujuan Pendirian BUMDes**

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pencapaian tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Undang-undang menyatakan bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

(Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jenis keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan;
- d. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

(Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007)

#### **4. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
  - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
  - 2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  - 3) Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78
  - 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
  - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  - 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 79
  - 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa

- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
    - a) Pemerintah Desa
    - b) Tabungan Masyarakat
    - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
    - d) Pinjaman
    - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
  - 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 80
- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81
- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    - a) Bentuk badan hukum
    - b) Kepengurusan
    - c) Hak dan kewajiban



- d) Permodalan
- e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
- f) Kerjasama dengan pihak ketiga
- g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang di dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

#### **5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudan dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

## 6. Teori Pendapatan Rumah Tangga

Sumber pendapatan pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu kelompok pendapatan di sektor pertanian dan non-pertanian. Sumber pendapatan di sektor pertanian merupakan kontribusi dari pendapatan usaha pertanian (usahatani sawah, kebun, pekarangan, usaha ternak) dan diluar usaha pertanian seperti buruh tani. Pendapatan di luar pertanian terdiri dari usaha non pertanian (dagang, industri, angkutan dan jasa), pegawai negeri, buruh non-pertanian dan pendapatan dari sumber lain seperti sumbangan, penyewaan aset dan lainnya (Sugiarto, 2005).

Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat hidup rumah tangga. Umumnya pendapatan rumah tangga di pedesaan tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Menurut Mosher (1987), tolak ukur yang penting dalam melihat kesejahteraan petani adalah pendapatan rumah tangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan petani. Besarnya pendapatan petani sendiri akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Pendapatan keluarga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan Hukum Engel yang menyatakan bahwa pendapatan keluarga yang meningkat akan diiringi dengan persentase pengeluaran untuk makanan yang menurun, persentase untuk sandang sama, persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk perumahan atau perbaikan adalah sama,

sedangkan untuk rekreasi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya mengalami peningkatan (Hernanto, 1994).

Menurut Sukirno (1985), terdapat empat ukuran pendapatan:

a. Pendapatan Kerja Petani

Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung semua penerimaan dan kenaikan investasi yang kemudian dikurangi dengan pengeluaran baik tunai maupun bunga modal dan investasi nilai kerja keluarga.

b. Penghasilan Kerja Petani

Pendapatan ini diperoleh dari selisih total penerimaan usahatani setelah dikurangi dengan bunga modal.

c. Pendapatan Kerja Keluarga

Pendapatan yang diperoleh dari balas jasa dan kerja serta pengelolaan yang dilakukan petani dan anggotanya yang bertujuan untuk menambah penghasilan rumah tangga.

d. Pendapatan Keluarga

Angka ini diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain yang diterima petani bersama keluarga di samping kegiatan pokoknya.

Pendapatan rumah tangga tidaklah hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi bisa berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang rendah, mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang

lebih besar (Mardikanto, 1993). Menurut Soeratno (1996), ukuran pendapatan yang digunakan untuk tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari bekerja. Tiap anggota keluarga berusia kerja di rumah tangga akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarganya. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa anggota keluarga seperti istri dan anak-anak adalah penyumbang dalam berbagai kegiatan baik dalam pekerjaan rumahtangga maupun mencari nafkah.

## **7. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus**

Perkembangan BUM Pekon Mandiri Bersatu tidak terlepas dari peranan pengurus di dalamnya. Baik atau tidak peranan seorang pengurus dalam menjalankan tugasnya, dapat dilihat dari kinerja pengurus tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengurus menurut Mahmudi (2005) antara lain:

- a. Faktor personal meliputi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh pengurus.
- b. Faktor tim meliputi dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan kerja dalam satu tim.
- c. Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, dan infrastruktur yang disediakan oleh organisasi.
- d. Faktor kontekstual meliputi kondisi lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal maupun internal.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai data pendukung maka sebuah dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting. Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi. Penelitian terdahulu mengenai peranan pengurus menjadi salah satu literatur acuan atau landasan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian dan pengembangan dalam peranan pengurus dan faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Samadi dkk, 2015	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif	Peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes di bidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa, namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.
2.	Dwi Afriyanto Purnomo, 2014	Peranan Pengurus Karang Taruna Berstatus Mahasiswa Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi	Kualitatif	Peranan yang dilakukan mahasiswa yaitu meningkatkan kedisiplinan, pemberian motivasi, meningkatnya hubungan baik dengan organisasi kemasyarakatan. Faktor pendukung yaitu SDM yang memadai, tanggungjawab dan kerjasama, fasilitas yang memadai, dukungan masyarakat. Faktor penghambat yaitu faktor finansial, kurangnya kepedulian berorganisasi bagi anggota. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan yang mampu melibatkan semua elemen masyarakat.
3.	Rizky Fitria Rahmah, 2014	Peranan Pengurus, Karyawan dan Anggota dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan Jatim Jaya PT. Jatim Taman Steel Sepanjang Sidoarjo	Kualitatif	Pengurus, karyawan dan anggota telah menjalankan peranannya dengan baik dalam rangka meningkatkan perolehan sisa hasil usaha koperasi. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan sisa hasil usaha koperasi pada tahun 2010 dan 2011. Untuk memaksimalkan peranan pengurus dan karyawan, maka pengurus dan karyawan yang dipilih adalah mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya. Sehingga pengurus dan karyawan dapat menarik partisipasi anggota, yang selanjutnya akan berdampak terhadap kenaikan sisa hasil usaha koperasi karyawan Jatim Jaya.

Tabel 2. (lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
4.	Wiyono, 2010	Peranan Pengurus Dalam Keberhasilan Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian (Posyanluhtan) di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	Survei, uji analisis <i>Rank Spearman</i>	Tingkat keberhasilan posyanluhtan di Desa Pardasuka masuk dalam kategori berhasil. Peranan pengurus dalam keberhasilan posyanluhtan masuk dalam kategori sedang. Terdapat hubungan nyata antara tingkat pendidikan formal, lamanya menjadi pengurus posyanluhtan, dan jarak domisili dengan peranan pengurus dalam keberhasilan posyanluhtan. Tidak terdapat hubungan nyata antara umur, tingkat kekosmopolitan dengan peranan pengurus.
5.	Rinaldi Prasetya, 2015	Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat	Survei, uji beda t berpasangan	Peranan kelompok tani dalam peningkatan pendapatan petani termasuk dalam klasifikasi tinggi. Rata-rata tingkat pendapatan petani kopi per tahun per hektar sebelum menjadi anggota kelompok tani Rp 10.797.325, dan setelah menjadi anggota kelompok tani Rp 20.068.064. Rata-rata peningkatan pendapatan petani kopi per tahun per hektar setelah menjadi anggota kelompok tani adalah Rp 9.270.738.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini akan diteliti mengenai beberapa hal antara lain kendala-kendala yang dialami pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengurus, dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus serta mengetahui perubahan tingkat pendapatan rumah tangga nasabah atau pelanggan yang tergabung dalam BUM Pekon Mandiri Bersatu antara sebelum bergabung dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, namun pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik non parametrik uji korelasi *Rank Spearman* untuk mengetahui keeratan hubungan variabel yang berpasangan yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus.

### **C. Kerangka Pemikiran**

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal. Keberadaan BUMDes sangat menunjang kebutuhan dan potensi desa, sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi,

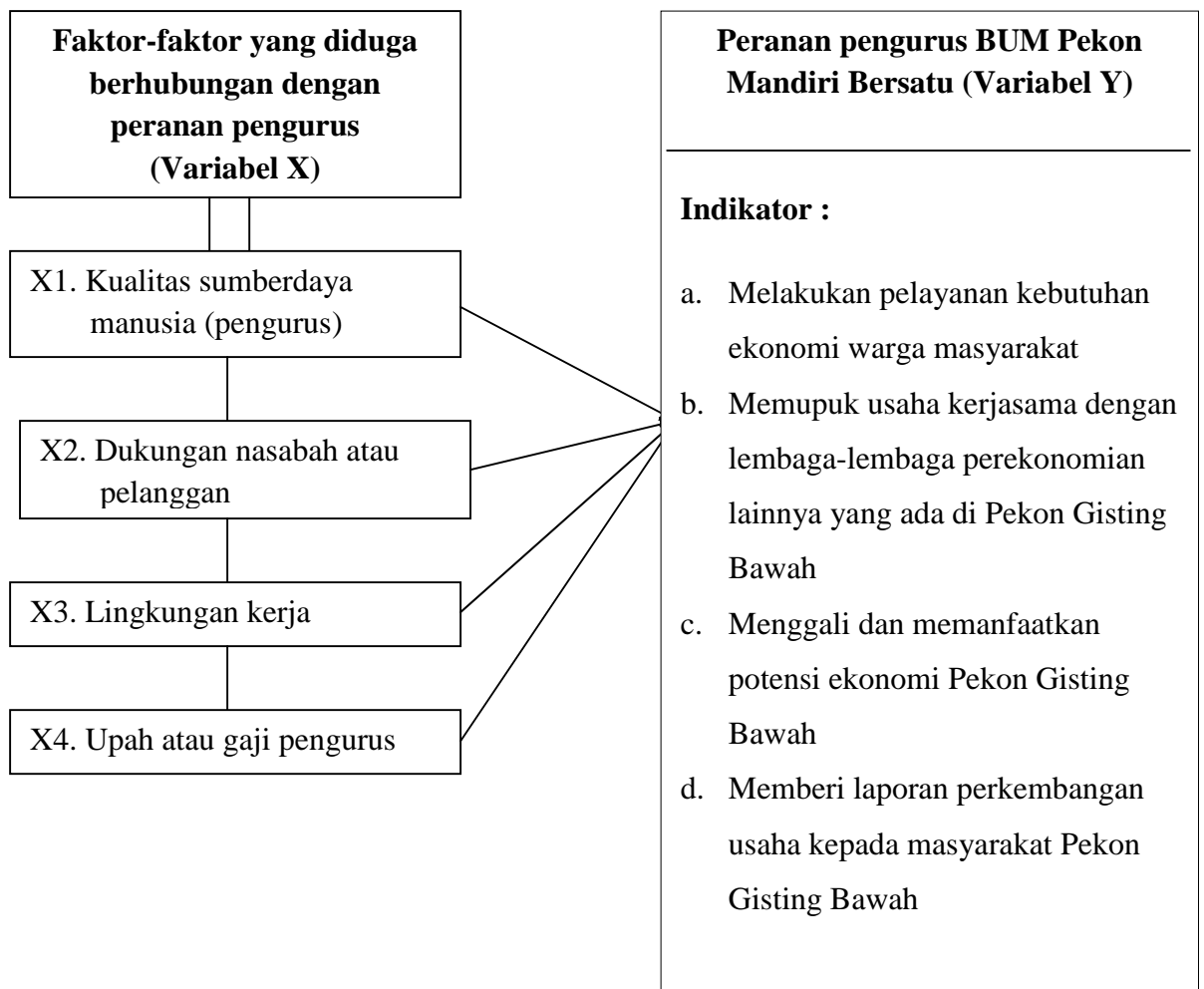
maka dari itu dalam menjalankan pelaksanaan BUMDes dibutuhkan pengurus yang mampu menjalankan peranan dan fungsi yang sangat penting.

Pengelolaan BUMDes dijalankan oleh pengurus BUMDes yang telah dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah. Hal ini menunjukkan peranan pengurus sangat penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat Pekon Gisting Bawah yang tergabung dalam BUM Pekon Mandiri Bersatu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengurus. Pada penelitian juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu serta mengetahui perubahan pendapatan rumah tangga nasabah atau pelanggan yang tergabung dalam BUM Pekon Mandiri Bersatu antara sebelum dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu. Badan Usaha Milik Pekon ini diteliti karena dilatarbelakangi oleh upaya memperkuat perekonomian desa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu berdasarkan tugas direksi dan kepala unit usaha dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Pekon Mandiri Bersatu Pasal 10 yaitu melakukan pelayanan kebutuhan ekonomi warga masyarakat, memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Pekon Gisting Bawah, menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Pekon Gisting Bawah, memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Pekon Gisting Bawah.

Beberapa faktor yang berhubungan dengan peranan menurut Mahmudi (2005) adalah faktor personal dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel X1 yaitu kualitas sumberdaya manusia (pengurus), faktor tim peliput dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel X2 yaitu dukungan nasabah atau pelanggan, faktor sistem dan kontekstual dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel X3 yaitu lingkungan kerja, dan upah atau gaji yang diterima pengurus. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan nyata dengan peranan pengurus merupakan variabel bebas (X). Peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu adalah variabel terikat (Y). Hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y) secara rinci disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Paradigma faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

**D. Hipotesis**

1. Diduga terdapat hubungan nyata antara kualitas sumberdaya manusia dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.
2. Diduga terdapat hubungan nyata antara dukungan nasabah atau pelanggan dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.
3. Diduga terdapat hubungan nyata antara lingkungan kerja dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.
4. Diduga terdapat hubungan nyata antara upah atau gaji pengurus dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional**

Konsep dasar dan definisi operasional adalah pengertian yang diberikan kepada variabel sebagai petunjuk dalam memperoleh data pada saat penelitian sehingga mempermudah proses analisis yang akan dilakukan. Konsep ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian dan istilah-istilah dalam penelitian. Berikut penguraian tentang definisi dan klasifikasi dari variabel-variabel yang akan diteliti.

##### **1. Variabel Bebas (X)**

Variabel bebas (X) terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Kualitas sumberdaya manusia/pengurus (X1), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan dalam mencapai keberhasilan dan diukur dengan menggunakan indikator pengetahuan (pengalaman), keterampilan (keahlian dan penguasaan teknis), serta kemampuan (pemecahan masalah dan koordinasi). Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:

- 1) Apakah anda mengetahui tujuan didirikan BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 2) Apakah anda mengetahui manfaat didirikan BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 3) Apakah anda memiliki pengalaman kerja di bidang lain sebelumnya.
- 4) Apakah pengalaman kerja yang dimiliki membantu menyelesaikan pekerjaan di BUM Pekon Mandiri Bersatu secara efisien.
- 5) Apakah di BUM Pekon Mandiri Bersatu terdapat pembagian tugas, jika terdapat pembagian tugas, maka apakah telah sesuai dengan bidang masing-masing.
- 6) Bagaimana menurut anda tingkat penguasaan teknis yang dimiliki dalam bekerja dan proses yang terkait dengan pekerjaan di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 7) Teknologi apakah yang digunakan di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 8) Siapa sajakah yang berwenang menggunakan teknologi tersebut
- 9) Apakah ada permasalahan yang timbul selama anda menjabat sebagai pengurus di BUM Pekon Mandiri Bersatu
- 10) Bagaimana anda merespon permasalahan yang ada di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 11) Apakah anda mampu untuk mengatasi permasalahan yang timbul.
- 12) Apakah tindakan anda dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut.

13) Bagaimana menurut anda kemampuan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja ataupun dengan masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

b. Dukungan nasabah atau pelanggan (X2), yaitu rangsangan atau dorongan yang diberikan masyarakat yang bergabung pada BUM Pekon Mandiri Bersatu yang ingin bekerjasama secara maksimal untuk mencapai tujuan BUM Pekon Mandiri Bersatu dan diukur dengan indikator tingkat persistensi, tingkat aspirasi, dan tingkat kepuasan terhadap adanya BUM Pekon Mandiri Bersatu. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:

- 1) Dukungan berupa apakah yang diberikan oleh nasabah/pelanggan untuk mencapai tujuan (peningkatan pendapatan nasabah/pelanggan) dari program BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 2) Apakah kegiatan program BUM Pekon Mandiri Bersatu telah sesuai dengan tujuan (peningkatan pendapatan nasabah/pelanggan) yang telah ditetapkan.
- 3) Apakah nasabah/pelanggan memiliki keinginan yang tinggi untuk bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 4) Apakah nasabah/pelanggan senantiasa puas dengan hasil yang dicapai dari program BUM Pekon Mandiri Bersatu.



Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

- c. Lingkungan kerja (X3), yaitu kehidupan sosial dan fisik dalam BUM Pekon Mandiri Bersatu yang berpengaruh terhadap pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Variabel ini diukur menggunakan indikator lingkungan fisik (keadaan kantor dan sarana prasarana) dan lingkungan non-fisik (kerjasama dan persaingan). Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:
- 1) Bagaimana kondisi penerangan tempat anda bekerja di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
  - 2) Apakah sarana penerangan yang disediakan sudah mencukupi.
  - 3) Bagaimana kondisi pertukaran udara tempat anda bekerja di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
  - 4) Apakah fasilitas di BUM Pekon Mandiri Bersatu yang disediakan cukup lengkap dan memadai.
  - 5) Apakah jumlah peralatan kerja yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik.
  - 6) Apakah kesempatan berprestasi dalam bekerja terbuka sesama rekan kerja.
  - 7) Apakah hubungan antara karyawan dengan pimpinan membantu anda dalam bekerja di BUM Pekon Mandiri Bersatu.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

- d. Upah atau gaji (X4), yaitu balas jasa yang diterima oleh pengurus dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Variabel ini diukur menggunakan indikator besaran (jumlah upah/gaji), cara/sistem penerimaan upah/gaji, waktu penerimaan upah/gaji. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:

- 1) Berapa upah/gaji yang diterima oleh anda.
- 2) Apakah upah/gaji tersebut telah mencukupi kebutuhan anda.
- 3) Apakah menurut anda upah/gaji yang diterima telah sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 4) Bagaimana cara/sistem penerimaan upah/gaji di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 5) Waktu penerimaan upah/gaji di BUM Pekon Mandiri Bersatu.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

## **2. Variabel Terikat (Y)**

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini yaitu peranan pengurus. Peranan pengurus adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Variabel terikat (Y) terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Melakukan pelayanan kebutuhan ekonomi warga masyarakat diukur dengan menggunakan indikator jumlah nasabah/pelanggan, frekuensi pelayanan, tingkat persistensi pengurus. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:

- 1) Berapakah jumlah nasabah/pelanggan di unit tempat anda bekerja di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 2) Jenis pelayanan apa yang dilakukan terhadap nasabah/pelanggan di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 3) Bagaimana waktu pelayanan yang dilakukan oleh pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 4) Menurut anda apakah anda selalu melakukan pelayanan pada saat nasabah/pelanggan datang ke BUM Pekon Mandiri Bersatu.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

b. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian, yaitu suatu usaha bersama antara BUM Pekon Mandiri Bersatu dengan lembaga perekonomian lain untuk mencapai tujuan bersama serta demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Indikator pengukuran ini yaitu bidang kerjasama dan instansi terkait kerjasama, SOP kerjasama, respon terhadap kerjasama. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:

- 1) Apakah BUM Pekon Mandiri Bersatu melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian dan instansi lain.
- 2) Kerja sama dalam bidang apakah yang dilakukan antara BUM Pekon Mandiri Bersatu dengan lembaga perekonomian tersebut.
- 3) Bagaimana SOP yang dilakukan antara BUM Pekon Mandiri Bersatu dengan instansi lain dalam menjalankan kerjasama.
- 4) Bagaimana respon anda terhadap kerjasama yang dilakukan antara BUM Pekon Mandiri Bersatu dengan instansi lain.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

- c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi, yaitu keterlibatan pengurus dalam mengolah potensi sumberdaya yang bernilai ekonomi dan membangun fasilitas-fasilitas secara langsung dari kegiatan yang telah direncanakan. Indikator pengukuran ini yaitu jenis pengelolaan sumberdaya sekitar yang dilakukan oleh pengurus dan persentase keikutsertaan pengurus dalam mengelola sumberdaya. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:
  - 1) Apakah ada pengelolaan sumberdaya sekitar yang telah dilakukan.
  - 2) Pengelolaan sumberdaya apa yang telah dilakukan.
  - 3) Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya tersebut.
  - 4) Bagaimana keikutsertaan pengurus lainnya dalam hal pengelolaan sumberdaya tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

- d. Memberi laporan perkembangan usaha, yaitu kegiatan pemberian laporan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri. Indikator pengukuran ini yaitu adanya pemberian laporan pertanggungjawaban kepada pihak berwenang dan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pihak yang berwenang. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan seperti:

- 1) Bentuk laporan-laporan yang pengurus berikan untuk diketahui nasabah/pelanggan.
- 2) Bagaimana pengurus mensosialisasikan kegiatan dan laporan keuangan BUM Pekon Mandiri Bersatu kepada nasabah/pelanggan yang tergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 3) Bagaimana cara pengurus melaksanakan, mengevaluasi, dan menjalankan hasil evaluasi kegiatan dan laporan keuangan BUM Pekon Mandiri Bersatu.
- 4) Apabila pada laporan keuangan pada periode berjalan mengalami defisit bagaimana pengurus mengatasinya.
- 5) Apa yang akan anda lakukan apabila dalam laporan keuangan periode berjalan mengalami surplus.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diukur dengan pemberian skor “1” rendah, skor “2” cukup, skor “3” tinggi, berdasarkan data lapangan.

## **B. Lokasi, Waktu, dan Responden**

Penelitian dilaksanakan di BUM Pekon Mandiri Bersatu, Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki jumlah desa terbanyak, namun hanya terdapat dua BUM Pekon, dan BUM Pekon Mandiri Bersatu merupakan BUM Pekon percontohan di Kabupaten Tanggamus karena BUM Pekon Mandiri Bersatu mendapat penghargaan pada acara rembuk desa nasional 2016 yaitu BUMDes terbaik dengan kategori berkembang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2017.

Populasi penelitian adalah pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dan masyarakat yang bergabung menjadi nasabah/pelanggan. Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu berjumlah 22 orang pengurus yang terdiri dari pengurus inti dan pekerja lapang dan nasabah/pelanggan berjumlah 276 Kepala Keluarga.

Penentuan sampel pengurus untuk dijadikan responden pada penelitian ini yaitu pengurus inti yang berjumlah 10 orang. Selain itu, diperlukan analisis lebih lanjut dari masyarakat yang tergabung dalam BUM Pekon Mandiri Bersatu baik menjadi pelanggan maupun nasabah mengenai pendapatan rumah tangga yang diperolehnya.

Pada BUM Pekon Mandiri Bersatu terdapat 7 unit usaha, namun pada penelitian ini hanya menggunakan 3 unit usaha untuk dijadikan sampel penelitian dengan pertimbangan 3 unit usaha ini telah berkembang lebih pesat dan memiliki

nasabah/pelanggan tetap, yaitu unit usaha penyediaan air bersih, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha pengelolaan sampah. Jumlah nasabah/pelanggan yang akan diteliti dari ketiga unit usaha tersebut adalah 276 Kepala Keluarga yang terdiri dari unit usaha penyediaan air bersih berjumlah 143 Kepala Keluarga, unit usaha simpan pinjam berjumlah 53 Kepala Keluarga, dan unit usaha pengelolaan sampah berjumlah 80 Kepala Keluarga. Perhitungan penentuan jumlah sampel berdasarkan teori Sugianto (2003), yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{N^2 + Z^2S^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

S<sup>2</sup> = variasi sampel (5%)

z = tingkat kepercayaan (90% = 1,645)

d = derajat penyimpangan (5%)

Jumlah sampel yang diperoleh dari rumus tersebut adalah :

$$n = \frac{276 (1,645^2) (0,05)}{276 (0,05^2) + (1,645^2) (0,05)}$$

$$n = 46$$

Pengambilan sampel untuk nasabah dan pelanggan yang tergabung dalam BUM

Pekon Mandiri Bersatu menggunakan metode *Proporsional Sampling*.

Pengambilan masing-masing sampel tiap unit usaha dilakukan dengan

menggunakan rumus alokasi *proporsional sample* (Nazir, 1988) sebagai berikut :

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

$n_i$  = jumlah sampel menurut stratum

$n$  = jumlah sampel seluruhnya

$N_i$  = jumlah populasi menurut stratum

$N$  = jumlah populasi seluruhnya

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel responden pada tiap unit usaha yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran sampel penelitian di Unit usaha air bersih, Unit usaha simpan pinjam, Unit usaha pengelolaan sampah BUM Pekon Mandiri Bersatu

No.	Nama Unit Usaha	Jumlah Anggota	Jumlah Sampel (Anggota)
1	Penyedia air bersih	143	24
2	Simpan pinjam	53	9
3	Pengelolaan sampah	80	13
	Jumlah	276	46

### C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari proses wawancara baik kepada pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dan masyarakat yang tergabung menjadi nasabah dan pelanggan BUM Pekon Mandiri Bersatu yang menjadi sampel. Alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah kuesioner. Data sekunder diperoleh melalui pencatatan dari berbagai kepustakaan, instansi atau lembaga yang terkait penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan pencatatan. Teknik wawancara dilakukan melalui pengumpulan data dengan



cara melakukan interaksi dan komunikasi dengan responden dan menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Pencatatan adalah pengumpulan data dengan cara mencatat data yang sudah ada di instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.

#### **D. Metode Analisis dan Pengujian Data**

Pada tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu dalam menjalankan tugasnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pengurus selaku responden, begitu pula untuk mengetahui tujuan kedua yaitu untuk mengetahui perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan di BUM Pekon Mandiri Bersatu antara sebelum dan sesudah bergabung akan diuraikan secara deskriptif.

Pada tujuan pertama yaitu mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan, analisis akan dilakukan secara inferensial dengan pengujian hipotesis digunakan analisis statistik non parametrik, yaitu korelasi *Rank Spearman* (Siegel, S. 1997) untuk variabel yang berpasangan.

Adapun rumus uji koefisien korelasi Rank Spearman (Siegel, 1997) adalah

sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n di^2}{n^3}$$

Keterangan :

$r_s$  = Koefisien korelasi peringkat spearman

$di$  = Perbedaan pasangan setiap peringkat

$n$  = Jumlah sampel

Bila terdapat rank kembar dalam variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y),

maka digunakan faktor koreksi T dengan rumus :

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan :

T = Faktor koreksi

t = Banyak observasi yang berkala sama pada suatu peringkat tertentu

Rumus perhitungan  $r_s$  menjadi :

$$r = \frac{\sum x^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum Y^2}}$$

$$r = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum xy^2}}$$

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum Y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan :

- $x^2$  = Jumlah kuadrat variabel X yang dikoreksi
- $Y^2$  = Jumlah kuadrat variabel Y yang dikoreksi
- $T_x$  = Jumlah faktor koreksi variabel X
- $T_y$  = Jumlah faktor koreksi variabel Y
- T = Faktor koreksi
- T = Banyaknya observasi berangka sama pada peringkat tertentu
- N = Jumlah sampel

Pada penelitian ini jumlah sampel lebih besar dari 10, maka pengujian

dilanjutkan dengan uji-t dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \left| r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r_s^2}} \right|$$

Keterangan :

- t hitung = Nilai t yang dihitung
- n = Jumlah sampel penelitian
- $r_s$  = Penduga korelasi Rank Spearman

Kaidah pengambilan keputusan adalah :

1. Jika t hitung  $\leq$  t tabel maka tolak  $H_0$ , pada  $(\alpha) = 0,1$  berarti tidak terdapat hubungan antara kedua variabel yang diuji.
2. Jika t hitung  $>$  t tabel maka terima  $H_0$ , pada  $(\alpha) = 0,1$  berarti terdapat hubungan antara kedua variabel yang diuji.

#### **IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

##### **A. Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus**

###### **1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri. Luas Kabupaten Tanggamus adalah 4.654,96 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 2.855,46 km<sup>2</sup> daratan dan wilayah laut seluas 1.799,50 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan dengan Ibukota Kota Agung (Badan Pusat Statistik, 2016).

Letak geografis Kabupaten Tanggamus secara rinci terletak pada posisi 104°18' -105°12' Bujur Timur dan antara 5°05' -5°56' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.

(Badan Pusat Statistik, 2016).

## **2. Keadaan Iklim**

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah tropis dengan curah hujan rata-rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari per bulan.

Kabupaten Tanggamus rata-rata bersuhu sedang. Topografi wilayah darat Kabupaten Tanggamus sangat bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi dan sekitar 40 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan daerah berbukit sampai bergunung, menyebabkan temperatur suhu berselang antara 21,3<sup>o</sup>C sampai 33,0<sup>o</sup>C (Badan Pusat Statistik, 2016).

## **3. Keadaan Demografi**

Penduduk Kabupaten Tanggamus tahun 2015 mencapai 573.904 jiwa yang terdiri dari 299.214 jiwa laki-laki dan 274.690 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tanggamus 123 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Pugung sebanyak 53.412 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kelumbayan dengan jumlah penduduk 10.830 jiwa. Kecamatan Gisting adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menduduki peringkat kelima jumlah penduduk terbanyak yaitu

38.862 jiwa. Penduduk dalam jumlah yang besar, memicu wilayah Kecamatan Gisting untuk mendirikan suatu lembaga usaha guna memperkuat keadaan ekonomi di kecamatan tersebut, maka beberapa Badan Usaha Milik Pekon didirikan di Kecamatan Gisting (Badan Pusat Statistik, 2016).

## **B. Kecamatan Gisting**

### **1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Gisting merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Gisting merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Talang Padang, yang diresmikan pada tanggal 13 Juli 2005. Luas Kecamatan Gisting adalah 32,53 km<sup>2</sup> yang terdiri dari sembilan pekon atau desa. Pekon Campang merupakan pekon yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu 9,00 km<sup>2</sup>, sedangkan pekon yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Pekon Landbaw dengan luas wilayah 1,31 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2016).

Secara administratif Kecamatan Gisting memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip.

(Badan Pusat Statistik, 2016).

## **2. Keadaan Iklim**

Kecamatan Gisting berada pada ketinggian 600 - 1.100 meter di atas permukaan laut dengan suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 35°C.

Rata-rata curah hujan per tahun di Kecamatan Gisting berkisar 1.750 - 2.000 milimeter per tahun dengan jumlah bulan basah 8 bulan dan jumlah bulan kering sebanyak 4 bulan (Badan Pusat Statistik, 2016).

## **3. Keadaan Demografi**

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Gisting 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Gisting mencapai 38.862 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 19.937 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.925 jiwa. Pekon dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Pekon Gisting Atas yaitu sebanyak 7.317 jiwa, sedangkan pekon dengan jumlah penduduk terkecil adalah Pekon Sidokaton yang hanya berpenduduk sebanyak 1.341 jiwa. Pada Kecamatan Gisting salah satu pekon yang memiliki potensi cukup baik yaitu Pekon Gisting Bawah. Pekon Gisting Bawah memiliki suatu wadah untuk mengembangkan perekonomian pekon tersebut yaitu dengan melakukan pendirian suatu badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian guna menyejahterakan kehidupan masyarakat Pekon Gisting Bawah.

### C. Pekon Gisting Bawah

Pekon Gisting Bawah berdiri sejak tahun 1987, namun pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2006 tentang pembentukan pekon, dilakukan perubahan wilayah. Pekon Gisting Bawah dimekarkan menjadi 3 pekon yaitu Pekon Gisting Bawah, Pekon Lanbaw, dan Pekon Sidokaton yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 22 Maret 2007. Pekon Gisting Bawah memiliki luas sebesar 262,5 Ha yang mencakup 7 dusun. Secara administratif, Pekon Gisting Bawah berbatasan dengan beberapa pekon sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Purwodadi dan Pekon Lanbaw.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gisting Atas.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung.

Pekon Gisting Bawah berada pada ketinggian 700 - 800 meter di atas permukaan laut dengan suhu minimum 18°C dan suhu maksimum 30°C. Rata-rata curah hujan per tahun di Pekon Gisting Bawah berkisar 2.000 milimeter per tahun dengan jumlah bulan basah 4 bulan. Sekitar 34% (85 ha) lahan di Pekon Gisting Bawah merupakan perkebunan rakyat, selebihnya merupakan sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, tegal/ladang, dan pemukiman.

Berdasarkan data monografi Pekon Gisting Bawah tahun 2016, jumlah penduduk di Pekon Gisting Bawah mencapai 7.904 jiwa. Jumlah tersebut



terdiri dari 4.092 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 3.812 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar penduduk di Pekon Gisting Bawah bekerja sebagai buruh tani dan buruh (swasta), sedangkan sebagian kecil berprofesi sebagai petani, PNS, pengrajin, pedagang, peternak, dan montir.

Kelembagaan ekonomi yang berada di Pekon Gisting Bawah yaitu lembaga koperasi, BUM Pekon, toko/kios, warung makan, angkutan, pangkalan ojek, becak, delman, dan sejenisnya. Prasarana pendidikan di Pekon Gisting Bawah meliputi SLTA/ sederajat berjumlah empat buah, SLTP/ sederajat berjumlah empat buah, SD/ sederajat berjumlah empat buah dan lembaga pendidikan agama berjumlah dua buah.

#### **D. BUM Pekon Mandiri Bersatu**

Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Mandiri Bersatu berdiri pada 5 Maret 2015. Pembentukan BUM Pekon didasarkan atas adanya kebutuhan dan potensi desa, dalam upaya memperkuat perekonomian serta membangun kerekatan sosial masyarakat pekon. BUM Pekon Mandiri Bersatu telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). BUM Pekon Mandiri Bersatu beralamatkan di Jalan Raya Gisting Bawah Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Adapun visi misi BUM Pekon Mandiri Bersatu adalah sebagai berikut:

## Visi

“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial”.

## Misi

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat pekon dan Pendapatan Asli Pekon.
2. Mengembangkan potensi perekonomian pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pekon.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi pekon.
4. Membuka lapangan kerja.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Pekon Gisting Bawah dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon maupun dari sumber-sumber lain yang sah.
6. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Pekon Gisting Bawah.
7. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Pekon Gisting Bawah yang berpenghasilan rendah.

BUM Pekon Mandiri Bersatu memiliki tujuh unit usaha yang dijalankan.

Berikut adalah uraian mengenai unit-unit usaha tersebut.

### 1. Unit Usaha Air Bersih

Unit usaha air bersih merupakan bidang usaha utama di BUM Pekon Mandiri Bersatu. Instalasi air bersih dibangun melalui Peraturan Kepala Pekon Nomor 1 Tahun 2015. Instalasi yang ada baru mencakup dusun 1A, 1B, sebagian dusun 3, dan sebagian dusun 5. Wilayah yang dilalui

instalasi air bersih yaitu memiliki pelanggan sebanyak 143 konsumen. Adanya permintaan yang terus meningkat dari masyarakat dusun 2A, dusun 3 dan dusun 5 untuk pemasangan jalur instalasi air bersih agar masyarakat dapat menikmati air bersih juga, namun hal ini terkendala dengan permodalan untuk pemasangan jalur instalasi, BUM Pekon Mandiri Bersatu belum bisa memenuhi kebutuhan air di dusun tersebut. Untuk keberlanjutan sarana prasarana pengelolaan air bersih maka unit air bersih dikelola secara terpadu dengan manajemen perusahaan yang sederhana dalam wadah BUM Pekon Mandiri Bersatu, dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat, tetapi masih memiliki keuntungan bagi pengelola untuk operasional, perawatan dan juga dapat memberikan Pendapatan Asli Pekon.

## 2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam ini dibentuk berdasarkan tujuan dibentuknya BUM Pekon Mandiri Bersatu yaitu “menghindarkan anggota masyarakat pekon dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat”, karena kondisi permodalan maka unit simpan pinjam baru bisa memberikan pinjaman bagi para pedagang dan *home industry* yang bermodalan kecil. Anggota simpan pinjam saat ini sebanyak 158 anggota, yang dalam hal ini unit simpan pinjam baru bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-. Sampai dengan saat ini, unit simpan pinjam memiliki modal awal Rp. 17.000.000,- dengan nasabah peminjam sebanyak 53 orang, dengan rincian peminjaman sebagai berikut:

- a. Peminjam Rp. 500.000,- sebanyak 43 orang
- b. Peminjam Rp. 1.000.000,- sebanyak 10 orang

Pada BUM Pekon Mandiri Bersatu anggota simpan pinjam berjumlah 158 orang, namun nasabah yang diberi pinjaman baru 53 orang dan yang masuk daftar tunggu peminjam sebanyak 105 orang. Apabila ada dana tambahan yang dapat dipinjamkan, maka keanggotaan akan bertambah karena BUM Pekon Mandiri Bersatu saat ini masih memberhentikan sementara pengajuan pinjaman ke anggota karena dana belum ada. Untuk simpanan (tabungan) bagi anggota sedang dalam proses karena BUM Pekon Mandiri Bersatu sedang menyusun sistem dan mekanismenya.

### 3. Unit Usaha Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)

Sampah merupakan masalah pokok di Pekon Gisting Bawah, karena banyak warga Pekon Gisting Bawah yang tidak memiliki lahan untuk pembuangan sampah, hanya sekitar 40% yang memiliki lahan untuk membuang sampah, tetapi sebanyak 60% tidak memiliki lahan pembuangan sampah. Hal ini menjadi peluang yang baik untuk membuka usaha pengelolaan sampah di Pekon Gisting Bawah, dari pengelolaan tersebut sampai dengan saat ini terdapat konsumen sebanyak 80 orang. Tata cara pengangkutan sampah yaitu diangkut menggunakan motor roda tiga setiap dua hari sekali per rumah tangga. Setiap konsumen dikenakan biaya langganan sebesar Rp. 20.000,- per bulan.

#### 4. Unit Usaha Pariwisata DAM dan Alam

Pariwisata DAM Margo Tirto saat ini masih banyak kekurangan dalam sarana prasarana pariwisata mulai dari bentuk fisik yang belum tertata serta arena prasarana bermain dan secara administrasi belum terkelola, hal ini disebabkan DAM (bendungan) sebagai obyek pariwisata merupakan milik dua pekon yaitu Pekon Gisting Bawah dan Pekon Lanbaw. Sejak BUM Pekon Mandiri Bersatu dibentuk, maka pengelolaannya diserahkan ke BUM Pekon. Sampai saat ini, unit usaha pariwisata DAM dan alam secara administrasi belum dikelola karena masih menunggu mekanisme dari Dinas Pariwisata yang mensyaratkan agar dibentuk Kelompok Sadar Wisata.

DAM Margo Tirto masuk ke dalam dua pekon, maka pembentukan Kelompok Sadar Wisata harus melibatkan dua pekon dan saat ini masih dalam taraf komunikasi dengan Pekon Lanbaw. Pariwisata Alam yaitu Gunung Tanggamus yang dijadikan tempat pendakian bagi pencinta alam. Hampir setiap minggunya para pendaki dari berbagai wilayah dan kelompok pendaki melakukan pendakian. Banyak pendaki yang membawa kendaraan bermotor sehingga mereka melakukan penitipan kendaraan dengan tarif motor Rp. 10.000,- dan mobil Rp. 20.000,-, dalam satu minggu dapat mencapai 10-20 motor. Wisata alam Pekon Gisting Bawah mempunyai motto yaitu “satu pendaki satu pohon”, jadi dari unit pariwisata menyediakan bibit pohon yang ditanam di Gunung Tanggamus, dengan harga Rp. 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,-.

#### 5. Unit Usaha Catering

Mulai beroperasinya Gedung Serba Guna Pekon Gisting Bawah maka salah satu yang dapat dikelola oleh BUM Pekon Mandiri Bersatu adalah catering. Usaha catering tersebut melayani konsumsi untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di GSG maupun di luar GSG. Adapun yang disediakan oleh unit usaha catering adalah kue kotak, jamuan meja tamu, nasi kotak, dan prasmanan.

#### 6. Unit Usaha Home Industri

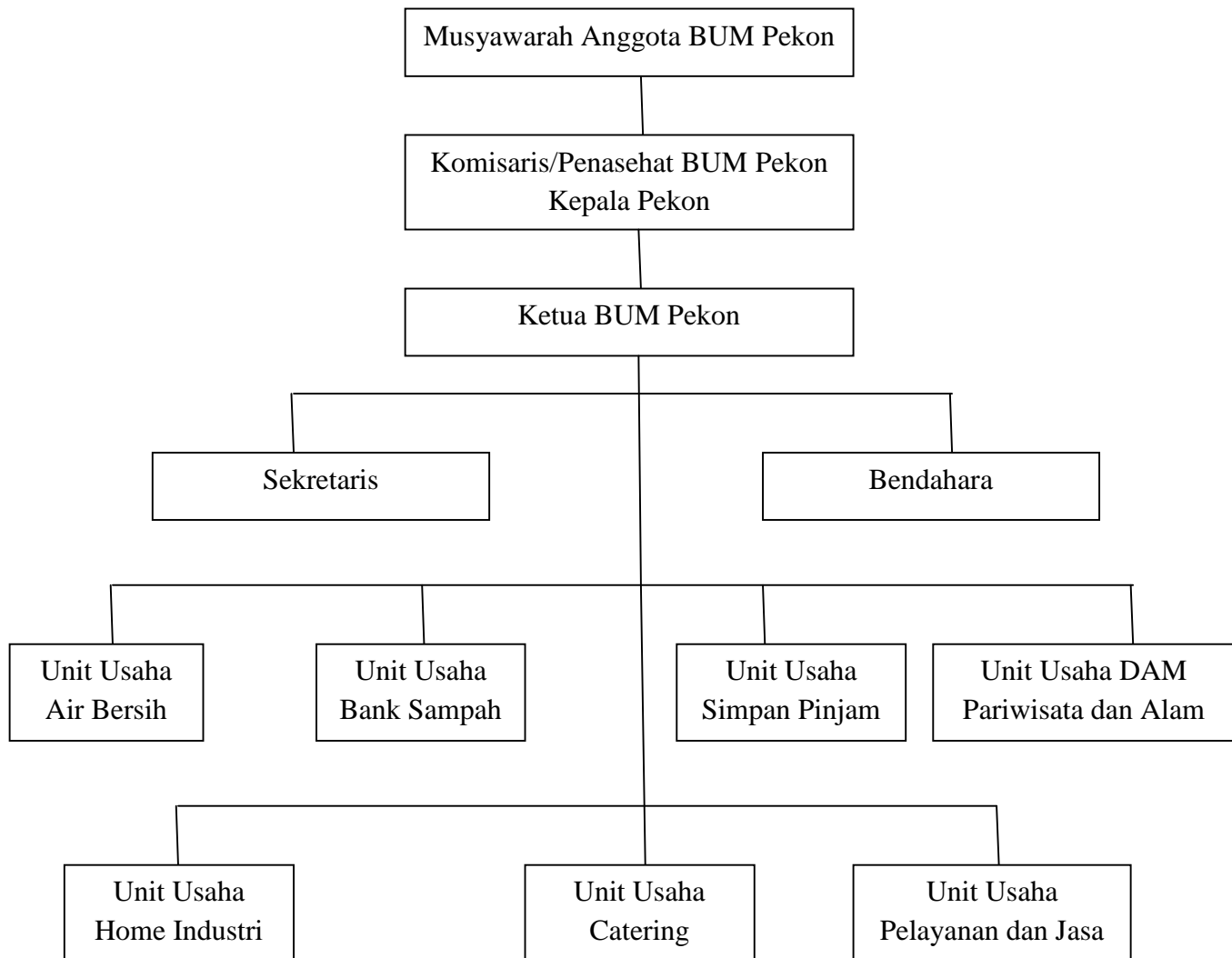
BUM Pekon Mandiri Bersatu mencoba mengambil alih produksi home industri makanan yaitu makanan ringan berupa dodol buah pala dan kopi bubuk, yang dapat dipasarkan di luar wilayah Gisting dengan nilai ekonomi yang lebih. Apabila pasar sudah terbangun, maka produksi home industri dodol buah pala dan kopi bubuk akan meningkat, karena omset produksi meningkat maka penghasilan pemilik home industri dodol buah pala dan kopi bubuk juga akan meningkat. Strategi pemasaran akan dibangun kios-kios hasil home industri berupa dodol buah pala dan kopi bubuk sebagai produk unggulan Pekon Gisting Bawah.

#### 7. Unit Usaha Pelayanan dan Jasa

Pekon Gisting Bawah memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan jasa pelayanan untuk pembayaran rekening listrik, pembelian token listrik, serta transaksi perbankan seperti menabung, menarik tabungan dan transfer. Saat ini, sudah ada kerjasama pinjaman dengan Bank BNI untuk kegiatan bank sampah dengan naman agen BNI 46.

Selain itu, BUM Pekon Mandiri Bersatu mempersiapkan Kredit Usaha Rakyat, persiapan kerja sama dengan Bank Bukopin untuk membuat ATM Mini, dan Bank Adji Caka memberikan bantuan pinjaman lunak, dan semuanya masih dalam proses penataan.

Susunan organisasi kepengurusan di BUM Pekon Mandiri Bersatu, terdiri dari komisaris (penasehat), direksi/pengurus selaku pelaksana operasional yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan manajer/kepala unit usaha yang berjumlah tujuh orang. Direksi dan Kepala Unit Usaha ditunjuk oleh masyarakat Pekon Gisting Bawah berdasarkan musyawarah dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Kewajiban pengurus dan kepala unit usaha yaitu menyampaikan rencana operasional BUM Pekon dan target-target yang akan dicapai kepada komisaris, mempertanggungjawabkan operasional kegiatan BUM Pekon dalam pencapaian target yang telah ditetapkan kepada komisaris, menyampaikan laporan secara keseluruhan dalam waktu enam bulan kerja yang harus diketahui oleh warga Pekon Gisting Bawah dalam suatu rembuk/musyawarah pekon. Berikut adalah struktur organisasi BUM Pekon Mandiri Bersatu tahun 2015-2020.



Keterangan:

————— Garis Komando

Gambar 2. Struktur organisasi BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting  
Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus periode 2015-2020



## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan pengurus Badan Usaha Milik Pekon terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat Pekon Gisting Bawah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kualitas sumber daya manusia (X1) dan lingkungan kerja (X3) memiliki hubungan yang nyata dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu, dan variabel upah/gaji (X4) dan dukungan nasabah/pelanggan (X2) tidak memiliki hubungan yang nyata dengan peranan pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu.
2. Terdapat perubahan tingkat pendapatan nasabah/pelanggan yang tergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu antara sebelum dan sesudah bergabung di BUM Pekon Mandiri Bersatu, jadi BUM Pekon Mandiri Bersatu mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah/pelanggan.
3. Kendala-kendala yang dialami pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu yaitu permodalan, masalah komplain pelanggan sampah, dan masalah mengenai pengelolaan sumberdaya di Pekon Gisting Bawah yang belum maksimal.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peranan pengurus dalam menggali dan memanfaatkan sumberdaya di Pekon Gisting Bawah harus lebih ditingkatkan, maka pengurus harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh pengurus agar dapat lebih memaksimalkan kinerja yang dimiliki pengurus.
2. Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti dengan tema yang sama, diharapkan melakukan observasi yang lebih mendalam lagi sebelum melakukan penelitian. Hal ini agar variabel yang ditentukan mendapat hasil yang sesuai harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan. Gisting Kabupaten Tanggamus.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. 2015. *Data Jumlah Badan Usaha Milik Desa 2014*. <http://bpmpd.lampungprov.go.id/data-jumlah-badan-usaha-milik-desa-bumdes-provinsi-lampung-tahun-2014.html>. Diakses pada 09 November 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Geografi*. Tanggamuskab.bps.go.id. Diakses pada 10 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Iklm*. Tanggamuskab.bps.go.id. Diakses pada 10 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kependudukan*. Tanggamuskab.bps.go.id. Diakses pada 10 Juni 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Friedman, M. 1998. *Basic role Theory & Practice*. EGC. Jakarta.
- Hernanto, F. 1994. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mantra, I. B. 2003. *Demografi Umum*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Mosher, A. T. 1987. *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif*. Disunting oleh Rochim Wirjoniodjojo. Yasaguna. Jakarta.

- Nazir, Moh., 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ndraha, T. 1982. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. UGM. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pekon
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Prasetya, R. 2015. *Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. [jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1055](http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1055). Diakses pada 3 Agustus 2017
- Purnomo, D. A. 2014. *Peranan Karang Taruna Berstatus Mahasiswa Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. [journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/download/492/458](http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/download/492/458). Diakses pada 15 Juni 2017
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Rahmah, R. F. 2014. *Peranan Pengurus Karyawan, Dan Anggota Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan Jatim Jaya PT Jatim Taman Steel Sepanjang Sidoarjo*. [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9234](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9234). Diakses pada 10 Juli 2017
- Sajogyo, P. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Etasa Dinamika. Jakarta.
- Samadi. 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. e-[journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384](http://journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384). Diakses pada 24 November 2016
- Sekretariat Negara. 2003. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003: *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Siegel, S. 1997. *Statistik Nonparametrik Ilmu - ilmu Sosial*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, S. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, S. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soeratno. 1994. *Ekonomi Pertanian*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiarto D, Siagian LT, Sunaryanto. 2003. *Teknik Sampling*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiarto. 2005. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran di Pedesaan*. Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian. Bogor. <http://pse.litbang.deptan.go.id>. Diakses pada 24 Desember 2016.
- Sukirno, S. 1985. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Surat Keputusan Kepala Pekon Gisting Bawah Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wiyono. 2010. *Peranan Pengurus dalam Keberhasilan Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian (Posyanluhtan) di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi Jurusan Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.